p-ISSN: 2963-7856| e-ISSN: 2961-9890
Available online at jerkin.org/index.php/jerkin
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Volume 4 No. 3, Januari-Maret 2026, pp 16236-16242

Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pinjaman Online dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Perdata Penyelengggara Pinjaman Online

Diana Ali Mahmudi[1]*, Rita Alfiana[2]
[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
E-mail: dianaalimahmudi@student.esaunggul.ac.id
* Corresponding Author

https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4597

ARTICLE INFO

Article history:
Received: 22 Dec 2025
Revised: 28 Dec 2025
Accepted: 03 Jan 2026

Kata Kunci:
Kebebasan Berkontrak, Kontrak Elektronik, Pinjaman Online, Fintech, Tanggung Jawab Perdata, Perlindungan Konsumen, Hukum Indonesia.

Keywords:
Freedom of Contract, Electronic Contracts, Online Loans, Fintech, Civil Liability, Consumer Protection, Indonesian Law.

ABSTRACT

Perjanjian pinjaman online dibuat dalam bentuk kontrak elektronik yang diakui secara hukum berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, asas kebebasan berkontrak yang secara teoritis memberikan otonomi kepada para pihak sering kali tidak terwujud secara substantif karena perjanjian fintech umumnya berbentuk kontrak baku yang disusun sepihak oleh penyelenggara. Ketimpangan posisi tawar ini kerap menghasilkan klausul yang merugikan dan dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, masalah seperti bunga berlebihan, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang tidak etis menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen dan keamanan data sebagaimana diatur dalam UU ITE, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta POJK No. 77/POJK.01/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis hubungan antara asas kebebasan berkontrak dengan tanggung jawab perdata penyelenggara fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara fintech dapat dimintai tanggung jawab perdata atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata maupun perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 apabila terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen.

Online loan agreements are executed in the form of electronic contracts that are legally recognized under Articles 1320 and 1338 of the Indonesian Civil Code and Article 1 point 17 of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. However, the principle of freedom of contract, which theoretically grants autonomy to the parties, is often not substantively realized because fintech agreements are generally presented as standard form contracts unilaterally drafted by the providers. This imbalance in bargaining power frequently results in unfair clauses prohibited under Article 18 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Moreover, issues such as excessive interest rates, misuse of personal data, and unethical debt collection practices indicate violations of consumer protection and data security regulations as stipulated in the ITE Law, Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches to analyze the relationship between the principle of freedom of contract and the civil liability of fintech providers. The findings indicate that fintech operators may be held civilly liable on the basis of breach of contract under Article 1243 of the Civil Code or tort liability under Article 1365 when consumer rights are violated.

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Diana Ali Mahmudi, et al (2025), Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pinjaman Online dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Perdata Penyelengggara Pinjaman Online, 4(3). https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4597

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat pada abad ke-21 telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak paling signifikan dapat dilihat dalam bidang ekonomi dan sistem keuangan, di mana aktivitas transaksi dan layanan keuangan mulai beralih ke ranah digital. Fenomena ini melahirkan inovasi bernama Financial Technology (fintech) yang mengintegrasikan teknologi dengan sistem keuangan untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Salah satu bentuk fintech yang berkembang pesat di Indonesia adalah layanan pinjaman online (peer to peer lending).

Keberadaan pinjaman online menjadi jawaban atas keterbatasan sistem perbankan konvensional yang sering kali mensyaratkan prosedur panjang dan ketat. Masyarakat, terutama kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadikan pinjaman online sebagai alternatif utama dalam memperoleh pembiayaan. Secara teoritis, hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna dalam layanan pinjaman online diatur berdasarkan perjanjian elektronik yang sah menurut hukum perdata dan peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi. Prinsip dasar dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Prinsip ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), yang memberikan ruang bagi individu untuk membuat kesepakatan berdasarkan kehendak bebas mereka sendiri. Dalam peer to peer lending, terdapat data pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, di mana penerima pinjaman adalah orang atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Namun, dalam praktiknya, kebebasan berkontrak dalam konteks pinjaman online sering kali tidak berjalan secara seimbang. Perjanjian digital yang ditawarkan oleh penyelenggara fintech umumnya berbentuk kontrak baku (standard contract), di mana seluruh ketentuan dan klausul telah ditetapkan sepihak oleh penyelenggara. Konsumen hanya diberi pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tersebut tanpa kesempatan untuk melakukan negosiasi. Hal ini menyebabkan ketimpangan posisi tawar (inequality of bargaining power) antara penyelenggara dan pengguna. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan kontraktual serta menimbulkan kerugian bagi konsumen yang posisinya lebih lemah secara ekonomi maupun hukum.

Selain itu, Ketimpangan posisi tawar tersebut berimplikasi pada munculnya klausul-klausul yang berpotensi merugikan konsumen, seperti pengenaan bunga dan denda yang tidak proporsional, pembatasan atau pengalihan tanggung jawab penyelenggara, serta pemberian akses yang berlebihan terhadap data pribadi konsumen. Praktik pencantuman klausul semacam ini secara tegas dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menghilangkan atau membatasi tanggung jawabnya serta klausula yang menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang. Dengan demikian, Pasal 18 UUPK menjadi instrumen hukum penting untuk membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pinjaman online.

Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, di mana keberlakuan asas kebebasan berkontrak yang ideal dalam hukum perdata tidak serta merta menjamin terciptanya keadilan substantif dalam hubungan hukum antara penyelenggara dan konsumen. Di sisi lain, permasalahan pinjaman online juga menimbulkan dilema hukum dalam penentuan tanggung jawab perdata penyelenggara fintech.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam pinjaman online memerlukan pembatasan hukum yang proporsional agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi yang lebih besar. Dengan memperhatikan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam mengenai dua rumusan masalah yang pertama tentang bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman online dan yang kedua bagaimana implikasi kebebasan berkontrak terhadap tanggung jawab perdata penyelenggara pinjaman online dalam hal terjadinya pelanggaran atau sengketa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana penerapan kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian

pinjaman online? dan (2) Bagaimana implikasi kebebasan berkontrak terhadap tanggung jawab perdata penyelenggara pinjaman online dalam hal terjadinya pelanggaran atau sengketa?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur pinjaman online dan perlindungan konsumen, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah asas kebebasan berkontrak dan keadilan kontraktual, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang relevan guna melihat penerapan hukum dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah menciptakan perubahan fundamental dalam sistem ekonomi global, terutama melalui kehadiran layanan keuangan digital atau financial technology (fintech). Salah satu sektor fintech yang mengalami pertumbuhan paling signifikan adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal sebagai pinjaman online. Kemunculan layanan ini secara teoritis menawarkan akses pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan inklusif, terutama bagi masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Namun, pada kenyataannya, perkembangan pesat pinjaman online justru menimbulkan problematika hukum yang kompleks, khususnya berkaitan dengan penerapan asas kebebasan berkontrak dan tanggung jawab perdata penyelenggara fintech.

Secara normatif, asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan bentuk, isi, dan syarat-syarat perjanjian berdasarkan kehendak bebas. Prinsip ini berakar pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menempatkan kontrak sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, dalam konteks pinjaman online, asas tersebut tidak berfungsi sebagaimana idealnya. Meskipun secara formal pengguna dianggap menyetujui seluruh ketentuan kontrak melalui mekanisme klik "setuju", validitas kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kebebasan dalam arti substansial. Hal ini terjadi karena relasi antara penyelenggara dan pengguna tidak berada dalam posisi setara, sehingga kontrak yang tercipta hanya menjadi formalitas administratif tanpa mencerminkan kesetaraan kehendak.

Akar persoalan ketidakseimbangan ini dapat ditelusuri pada struktur hubungan antara penyelenggara fintech dan konsumen yang sejak awal tidak simetris. Penyelenggara memiliki kapasitas teknologi, modal, pengetahuan, serta otoritas untuk menentukan seluruh klausul kontrak. Sebaliknya, konsumen berada pada posisi yang lebih lemah secara ekonomi, informasi, dan kemampuan negosiasi. Kondisi ini melahirkan kontrak baku yang disusun sepihak oleh penyelenggara, di mana pengguna hanya diberi dua pilihan: menerima seluruh ketentuan atau tidak mengakses layanan sama sekali. Dalam situasi ini, kebebasan berkontrak yang seharusnya menjadi pilar keadilan kontraktual justru berubah menjadi instrumen legitimasi ketimpangan kekuasaan yang merugikan konsumen. Penegakan hukum terhadap kasus ini membutuhkan sinergi antarinstansi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas sektor jasa keuangan memiliki kewenangan administratif, namun belum memiliki yurisdiksi pidana.(Elda Septi Darmayanti & Sidi Ahyar Wiraguna, 2025)

Di sisi lain, problematika tidak hanya muncul dari aspek kontraktual, tetapi juga dari ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara para pihak. Konsumen sering kali tidak memahami isi kontrak secara mendalam karena bahasa yang digunakan bersifat teknis dan kompleks, sementara proses digital mendorong mereka untuk menyetujui kontrak secara cepat. Banyak pengguna yang tidak membaca, apalagi memahami, ketentuan mengenai bunga, denda, pemrosesan data pribadi, hingga konsekuensi keterlambatan pembayaran. Ketidaktahuan ini membuat kesepakatan yang terbentuk jauh dari konsep kesepakatan bebas (*free consent*), sehingga mereduksi makna kesepakatan (*consensus*) sebagai syarat sah perjanjian.

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

Teknologi finansial (*fintech*), khususnya layanan peer-to-peer lending (P2P lending), telah mendorong transformasi dalam hukum kontrak modern. Dalam perjanjian pinjaman online, asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) tercermin dalam kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk, isi, syarat, dan mekanisme pelaksanaan kontrak secara elektronik. Konsumen dapat memilih platform yang digunakan, menyetujui syarat dan ketentuan, serta memutuskan jumlah dan tenor pinjaman. Sebaliknya, penyelenggara layanan memiliki kebebasan menyusun klausula dan menetapkan ketentuan risiko.

Namun, meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak, praktiknya terjadi ketidakseimbangan posisi tawar (inequality of bargaining power). Sebagian besar perjanjian pinjaman online disajikan dalam bentuk standard form contract atau kontrak baku yang disusun sepihak oleh penyelenggara. Konsumen tidak diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian. Kondisi ini menggeser asas kebebasan berkontrak menjadi kebebasan semu, karena konsumen hanya dapat memilih antara "setuju" atau "menolak", tanpa alternatif. Klausula baku yang menetapkan bunga tinggi, denda keterlambatan berlebihan, atau akses data pribadi yang luas menimbulkan risiko pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam perjanjian.

Selain itu, penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian pinjaman online menguatkan keberlakuan kontrak secara hukum berdasarkan UU ITE. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur struktur kontrak pinjaman online sehingga masih terjadi celah hukum yang dapat merugikan konsumen. Dengan demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pinjaman online perlu ditempatkan dalam kerangka kebebasan yang bertanggung jawab, selaras dengan kepatutan dan keseimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online semakin penting mengingat tingginya potensi penyalahgunaan data pribadi, penetapan bunga yang tidak transparan, dan praktik penagihan tidak beretika. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, aman, dan jaminan tidak adanya klausula yang merugikan. Dalam konteks pinjaman online, perlindungan ini diperkuat oleh regulasi OJK seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Perlindungan hukum preventif diberikan melalui kewajiban penyelenggara untuk menyediakan informasi detail mengenai bunga, biaya administrasi, risiko gagal bayar, dan mekanisme penagihan. Selain itu, penyelenggara dilarang mengakses data pribadi yang tidak relevan seperti daftar kontak dan galeri, sehingga meminimalkan potensi intimidasi melalui penyebaran data pribadi. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme pengaduan ke OJK, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, dan sanksi administratif bagi platform yang melanggar ketentuan. Namun, perlindungan hukum belum berjalan optimal akibat rendahnya literasi digital konsumen dan banyaknya penyedia pinjaman online ilegal. Platform ilegal tidak terikat pada regulasi OJK, menerapkan bunga sangat tinggi, dan sering melakukan penagihan tidak manusiawi. Dalam situasi demikian, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting, terutama melalui penegakan hukum pidana terhadap fintech ilegal, edukasi konsumen, dan penguatan regulasi perlindungan data pribadi melalui UU PDP.

Perlindungan hukum yang efektif memerlukan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kepentingan penyelenggara. Konsumen perlu dilindungi dari praktik eksploitatif, sementara penyelenggara diberikan kepastian hukum agar tetap dapat berinovasi dalam pengembangan fintech yang sehat. Dengan kata lain, hukum harus berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ekosistem pinjaman online yang aman, adil, dan berkelanjutan.

Di dalam perjanjian pinjaman online, asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan secara absolut. Kebebasan penyelenggara dalam menentukan klausula kontrak harus dibatasi oleh prinsip perlindungan konsumen. Hal ini sejalan dengan konsep hukum kontrak modern yang menempatkan perlindungan terhadap pihak lemah sebagai prioritas. Regulasi OJK bertindak sebagai penyeimbang dengan mengatur batasan bunga, transparansi biaya, serta mekanisme evaluasi kelayakan kredit.

Hubungan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen bersifat komplementer. Keduanya harus dapat berjalan beriringan untuk memastikan terciptanya keadilan kontraktual. Kebebasan berkontrak memberi ruang bagi inovasi layanan keuangan, sementara perlindungan konsumen memastikan bahwa inovasi tersebut tidak merugikan pihak yang posisinya lemah. Apabila kebebasan berkontrak terlalu dominan, konsumen akan rentan terhadap klausula eksploitatif; sebaliknya,

jika perlindungan konsumen terlalu ketat, hal tersebut dapat menghambat perkembangan industri fintech. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya menjadi kunci utama dalam pembentukan perjanjian pinjaman online yang berkualitas.

Implikasi Kebebasan Berkontrak terhadap Tanggung Jawab Perdata Penyelenggara Pinjaman Online dalam Hal Terjadinya Pelanggaran atau Sengketa

Implikasi dari permasalahan-permasalahan ini sangat luas terhadap tanggung jawab perdata penyelenggara fintech. Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab muncul ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Namun, pembuktian dalam perkara digital sering kali sulit dilakukan karena sifat transaksi yang tidak tatap muka, melibatkan kode elektronik, serta pelibatan pihak-pihak lintas yurisdiksi. Ketika terjadi kerugian akibat kebocoran data, penagihan kasar, atau penyalahgunaan informasi pribadi, konsumen sering mengalami hambatan dalam mengajukan gugatan karena proses identifikasi pelaku dan bukti digital yang tidak sederhana. Kondisi ini semakin memperlemah posisi konsumen dalam menuntut tanggung jawab penyelenggara, terutama ketika platform tidak memiliki badan hukum atau kantor fisik di Indonesia.

Dengan demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pinjaman online membutuhkan reinterpretasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Kebebasan berkontrak seharusnya tidak dimaknai secara absolut, tetapi harus dibatasi oleh prinsip keadilan, perlindungan konsumen, dan kesetaraan substantif antara para pihak. Negara harus hadir melalui kebijakan hukum yang lebih progresif untuk menutup celah eksploitasi, memperkuat mekanisme pengawasan, dan memastikan bahwa kontrak digital benar-benar mencerminkan kesepakatan bebas, bukan hasil tekanan struktural atau ketidaktahuan konsumen.

Ketimpangan posisi tawar antara penyelenggara dan konsumen dalam perjanjian pinjaman online tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin dalam praktik. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, di mana penyelenggara pinjaman online ilegal terbukti menyalahgunakan data pribadi konsumen untuk kepentingan penagihan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa klausula baku yang memberikan akses luas terhadap data pribadi konsumen bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang.

Sebagian besar platform pinjaman online menggunakan perjanjian baku (standard contract) yang disusun sepihak oleh penyelenggara. Konsumen tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan klausula, sehingga kebebasan berkontrak hanya bersifat formal. Kondisi ini menimbulkan implikasi bahwa penyelenggara memikul tanggung jawab perdata yang lebih besar apabila kontrak baku tersebut mengandung klausula yang tidak transparan, merugikan konsumen, bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), atau tidak memenuhi asas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 dan 1338 ayat (3) KUHPerdata. Dalam hal terdapat klausula yang tidak adil, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, terutama apabila klausula tersebut menyebabkan kerugian finansial atau penyalahgunaan data pribadi. Dengan demikian, kebebasan berkontrak tidak membebaskan penyelenggara dari kewajiban untuk menyusun isi perjanjian yang adil dan proporsional.

Ketika terjadi pelanggaran atau sengketa, bentuk tanggung jawab perdata penyelenggara dapat muncul dalam berbagai bentuk bergantung pada jenis pelanggarannya. Pelanggaran terhadap prinsip transparansi, seperti pengenaan bunga dan biaya tersembunyi, menyebabkan penyelenggara bertanggung jawab mengganti kerugian material yang diderita konsumen. Selain itu, penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi memungkinkan penyelenggara digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dan UU Perlindungan Data Pribadi. Dalam hal penagihan yang tidak etis melalui tindakan intimidatif atau ancaman, konsumen berhak menuntut ganti rugi immaterial atas pencemaran nama baik dan tekanan psikologis. Penyelenggara juga bertanggung jawab memulihkan kerugian akibat informasi palsu atau tidak lengkap dalam kontrak, termasuk pembatalan kontrak apabila konsumen dirugikan oleh misrepresentation. Implikasinya, penyelenggara tidak dapat bersembunyi di balik asas kebebasan berkontrak karena perjanjian elektronik tetap harus memperhatikan keseimbangan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Batasan kebebasan berkontrak sebagai dasar penguatan tanggung jawab juga memiliki kelemahan sehingga mempunyai batasan tertentu, seperti tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

undangan, kesusilaan, maupun kepentingan umum, serta harus memperhatikan asas itikad baik. Dalam konteks pinjaman online, batasan-batasan tersebut memperkuat dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut tanggung jawab perdata. Ketika penyelenggara menyusun klausula yang membatasi atau bahkan menghilangkan tanggung jawabnya, klausula tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum (void) karena melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK mengenai larangan pencantuman klausula eksonerasi. Artinya, meskipun asas kebebasan berkontrak membuka ruang kreativitas bagi penyelenggara dalam membuat format perjanjian, batasan hukum tetap menjadi penentu validitas tanggung jawab mereka.

Dalam hal terjadi sengketa, kebebasan berkontrak memberikan legitimasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak, misalnya melalui penyelesaian internal platform, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), arbitrase, atau gugatan ke pengadilan negeri. Kontrak baku sering mencantumkan klausula pilihan forum (choice of forum) atau pilihan hukum (choice of law). Meskipun demikian, apabila klausula tersebut memberatkan atau menghilangkan hak konsumen, maka hakim dapat mengesampingkan klausula tersebut. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan penyelenggara untuk menghindari tanggung jawab perdata melalui klausula sepihak.

Konsekuensi yuridis jika terjadi pelanggaran mencakup ganti rugi material atas kerugian finansial dan bunga yang tidak sah, ganti rugi immaterial atas tekanan psikologis, pemulihan atau penghapusan data yang disalahgunakan, pembatalan kontrak, hingga pemulihan keadaan seperti semula (restitutio in integrum). Selain itu, sanksi administratif oleh OJK juga dapat memperkuat tanggung jawab perdata tersebut. Implikasi ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut; justru ketika terjadi pelanggaran, asas ini menjadi alat untuk menilai apakah perjanjian disusun dengan itikad baik atau mengandung ketidakseimbangan yang merugikan konsumen.

SIMPULAN

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pinjaman online menunjukkan adanya pergeseran makna dari kebebasan substansial menjadi kebebasan semu akibat penggunaan kontrak baku (standard form contract) yang disusun sepihak oleh penyelenggara fintech. Meskipun secara formal perjanjian elektronik ini memenuhi unsur kesepakatan sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, ketidakseimbangan posisi tawar antara penyelenggara dan konsumen menyebabkan hilangnya ruang negosiasi, sehingga konsumen sering kali terjebak dalam klausula yang merugikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum melalui regulasi OJK dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi instrumen krusial untuk mengembalikan keadilan kontraktual, di mana kebebasan berkontrak dalam ekosistem digital tidak lagi bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada prinsip transparansi, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Implikasi dari ketidakseimbangan tersebut mempertegas tanggung jawab perdata penyelenggara fintech yang dapat muncul dalam bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, terutama ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi, penagihan tidak etis, atau pencantuman klausula eksonerasi. Berdasarkan Pasal 18 UUPK dan Pasal 1365 KUHPerdata, segala bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen memberikan legitimasi yuridis bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi material maupun immaterial serta pemulihan keadaan semula (restitutio in integrum). Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak justru menjadi indikator penilaian bagi hakim untuk menguji itikad baik penyelenggara, di mana setiap klausula yang melanggar peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum dapat dinyatakan batal demi hukum demi menjamin kepastian hukum di sektor keuangan digital.

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat pengawasan preventif terhadap isi kontrak baku serta menetapkan standar operasional yang lebih ketat terkait transparansi bunga dan perlindungan data pribadi untuk menutup celah eksploitasi oleh penyelenggara fintech, baik yang legal maupun ilegal. Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggara fintech diharapkan mampu mengedepankan prinsip itikad baik dengan menghapus klausula-klausula yang bersifat eksoneratif, meningkatkan standar keamanan sistem elektronik untuk mencegah kebocoran data, serta memastikan bahwa seluruh mekanisme penagihan dilakukan tanpa intimidasi agar selaras dengan kode etik dan regulasi yang berlaku.

Masyarakat dan pengguna layanan pinjaman online disarankan untuk terus meningkatkan literasi digital serta bersikap lebih kritis dalam memahami hak, kewajiban, dan risiko hukum sebelum

memberikan persetujuan pada perjanjian elektronik guna meminimalisir kerugian di masa depan. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan kajian ini melalui pendekatan empiris untuk melihat efektivitas penegakan hukum di lapangan atau melakukan studi komparatif mengenai regulasi perlindungan konsumen fintech di negara lain, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan hukum kontrak digital di Indonesia yang lebih progresif dan adaptif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian sekaligus penyusunan artikel ini.

REFERENSI

Atmoko, D., & Saputri, A. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Litnus.

Darmayanti, E. S., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung jawab hukum pinjaman online terhadap penyebaran data nasabah secara ilegal. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 233–251.

Febrian, S. F., & Samawati, P. (Eds.). (2022). *Hukum perlindungan konsumen: Perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Unsri Press.

Haris, A. (2019). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia* (Edisi revisi). Prenadamedia Group.

Hasan, M. (2025). Analisis yuridis terhadap tanggung jawab penyedia pinjol ilegal dan fenomena debitur nakal. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3).

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Laporan penanganan pinjaman online ilegal tahun 2022*. Kominfo RI.

Model pertanggungjawaban kreditur pinjaman online kepada pemilik kontak seluler (non debitur) atas akses ilegal pada kontak debitur. (2022). *Majalah Hukum Nasional*, 52(2).

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Siaran pers penutupan 151 aplikasi pinjaman online ilegal*. OJK.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2020). *Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tentang penyebaran data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online ilegal*.

Perangin-angin, D., Sunarmi, Sukarja, D., & Harianto, D. (2025). Perlindungan hukum nasabah pinjaman online ilegal dalam hal penagihan secara melawan hukum dengan menyalahgunakan data pribadi: Studi kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(4), 238–253.

Rosmidah, T., Yahya, T., & Wulansari, D. P. (2024). Bentuk perlindungan hukum penyelesaian sengketa pinjaman online di Indonesia (suatu pendekatan norma hukum). *Wajah Hukum*, 8(1), 95–100.

Subekti. (2015). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)